

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya stabilitas sistem keuangan (Wahyuningsih, 2017). Stabilitas sistem keuangan (SSK) belum mempunyai pengertian secara baku sehingga diartikan bahwa dimana suatu sistem tidak stabil akan menyebabkan bahaya serta dapat menghambat suatu kegiatan perekonomian. Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi penting terhadap perekonomian guna mengalokasikan dana melalui pihak yang mengalami surplus ke pihak yang mengalami defisit.

Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi dimana sistem keuangan dapat mengalokasikan dana dengan efisien, dapat menahan terjadinya guncangan ekonomi serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dianggap sebagai kondisi mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana serta adanya pengelolaan resiko guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang tidak stabil secara efisien menimbulkan proses alokasi dana yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini, dianggap dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilannya sistem keuangan akan menyebabkan permasalahan ekonomi misalnya krisis global di tahun 2008 yang mengakibatkan rendahnya kinerja ekonomi di suatu negara (Awanti, 2017). Oleh sebab itu, stabilitas sistem keuangan penting dalam perekonomian berkelanjutan. Ketidakstabilan sistem keuangan akan menimbulkan berbagai masalah seperti:

1. Tidak berfungsinya transmisi kebijakan moneter dengan baik maupun tidak efektif.
2. Tidak berjalannya intermediasi dengan lancar yang disebabkan oleh adanya masalah pada alokasi dana yang kurang tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Tingginya biaya dalam pemulihan sistem keuangan setelah terjadinya krisis.

Sistem keuangan yang tidak stabil akan menimbulkan kegagalan terhadap faktor struktural maupun perilaku. Adanya kegagalan ini berasal dari kegagalan internal maupun eksternal. Secara umum, ketidakstabilan sektor keuangan bersifat *forward looking*, adanya hal tersebut guna mengetahui resiko yang akan berpengaruh terhadap sistem keuangan pada masa yang akan mendatang.

Kondisi keuangan krisis pada tahun 1998 dan 2008, menyebabkan masyarakat menarik dananya dari bank serta institusi keuangan (*panic withdrawal*). Hal ini disebabkan sentimen negatif psikologis masyarakat mengenai keadaan disaat itu sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan pada lembaga keuangan (*lack of confidence*). Keadaan seperti ini menjadi pelajaran akan pentingnya mengurangi resiko sistematis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Fauziah *et al*, 2020). Secara teori faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan yaitu, inflasi, BI *rate*, ratio kredit macet, dan aliran modal. Ketidakstabilan sistem keuangan terjadi apabila inklusif keuangan mengakibatkan penurunan standar kredit, peningkatan resiko, reputasi bank serta tidak adanya respon regulasi pada keuangan mikro (Deinillah *et al*, 2018)

Negara berkembang dikatakan sebagai negara yang mempunyai modal sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk serta sumber

alamiah yang dimiliki oleh negara tersebut. Menurut Hardiyanto, (2019) negara berkembang adalah negara yang mempunyai pendapatan perkapita, kualitas pembangunan manusia serta penggunaan teknologi yang cenderung masih rendah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tujuh dari negara berkembang yaitu Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand. Tujuh negara tersebut adalah negara yang berpendapatan menengah kebawah sehingga dapat dikategorikan sebagai negara berkembang dimana menunjukkan fakta bahwa peningkatan inklusi keuangan pada tujuh negara berkembang tersebut mempunyai peluang yang bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan serta berpotensi dapat menyebabkan instabilitas dalam stabilitas sistem keuangan pada tujuh negara tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Allen *et al* (2012) dalam Hardiyanto (2019) bahwa suatu negara yang memiliki pendapatan menengah kebawah mempunyai inklusif keuangan yang dianggap kurang baik apabila dibandingkan dengan negara yang berpendapatnya tinggi dan disamping itu beberapa negara tersebut diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat jika dibandingkan dengan negara lainnya. Penelitian ini menggunakan tujuh negara berkembang sebagai dasar penggunaan data yaitu Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand. Penggunaan tujuh negara tersebut didasarkan pada tingkat pendapatan perkapita ke tujuh negara yang masih cenderung rendah serta berdasarkan kelengkapan data yang tersedia.

Negara berkembang merupakan negara dengan perekonomian yang berbeda jika dibandingkan dengan ekonomi negara maju dimana mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat serta modernisasi. Kebanyakan negara berkembang didasarkan oleh populasi muda serta

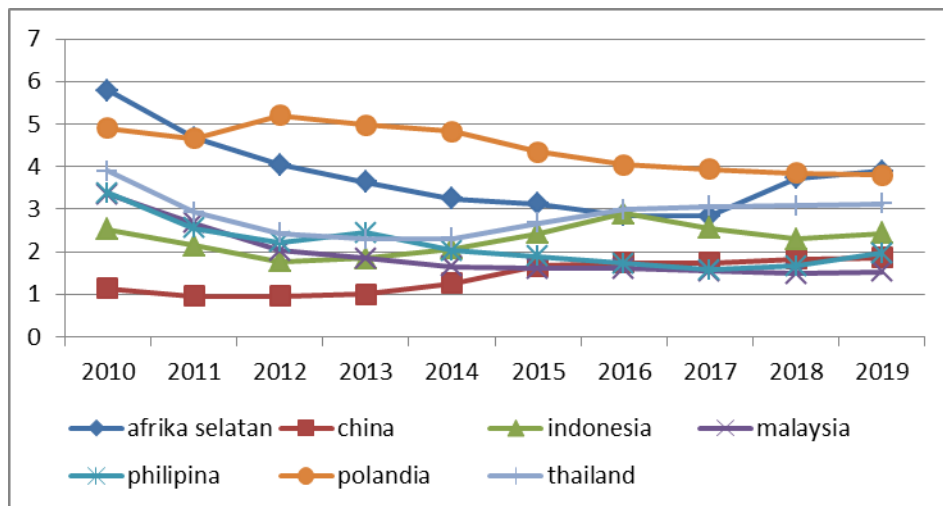
kelas menengah yang berkembang. Menurut Todaro, (2004) bank dunia mengelompokkan negara-negara di dunia yang dapat menjadi kategori negara berkembang dengan tingkat pendapatan perkapita sebagai berikut :

1. Negara dengan pendapatan rendah dimana mempunyai pendapatan perkapita sebesar US\$ 975 atau kurang.
2. Negara dengan pendapatan menengah kebawah yang mempunyai pendapatan perkapita rata-rata US\$ 976 sampai US\$ 3,855.

Meskipun negara berkembang memiliki kelemahan namun negara berkembang telah mulai menghasilkan para penantang global baru dimana perusahaan top dengan cepat menjadi peserta kunci dalam pasar-pasar dunia (Hartono, 2014). Lembaga keuangan bank dan non bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan pada perekonomian suatu negara. Salah satunya yaitu dapat menjaga kestabilan keuangan pada perekonomian dinegara tersebut (Maflukhah, 2021). Pertumbuhan yang disertai dengan perkembangan ekonomi di suatu negara secara otomatis akan mendorong perkembangan lembaga keuangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel untuk mewakili inklusi keuangan yaitu variabel Jumlah cabang bank komersil per 100,000 populasi, jumlah ATM per 100,000, GDP perkapita, dan variabel *Non FDI capital flow* terhadap GDP. Dimana variabel jumlah cabang bank dan jumlah ATM tersebut digunakan guna mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal sehingga bisa dilihat apabila terjadinya potensi hambatan dalam membuka dan mempergunakan keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM dan lain-lain). Peningkatan pada GDP perkapita akan meningkatkan jumlah akun perbankan masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya stabilitas sistem keuangan. Penggunaan variabel *Non FDI capital flow* terhadap GDP pada penelitian

ini dikarenakan *Non FDI capital flow* terhadap GDP dapat meningkatkan deposito bank sehingga bisa meningkatkan kredit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian salah satunya yang dilakukan oleh penelitian (Dienillah dan Lukytawati, 2016). Penulis juga memperhatikan ketersediaan data dari tujuh negara berkembang untuk data dari variabel tersebut. Sedangkan untuk variabel yang digunakan untuk proksi stabilitas sistem keuangan yaitu variabel *Non Performing Loan* (NPL).

Non performing loan adalah salah satu pembiayaan atau kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan dengan likuiditas kurang lancar, macet atau diragukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produksi. Menurut Wati, (2019) NPL adalah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank untuk mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *Non performing loan* merupakan acuan dari pihak bank guna memberikan kredit kepada pihak masyarakat. Semakin kecilnya tingkat NPL suatu negara, bank akan berani menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat (Simaremare, 2013 dalam Maflukhah, 2021). Berikut ini merupakan kondisi mengenai *Non Performing Loans* (%) pada tujuh negara berkembang.



Gambar 1.1 *Non Performing Loan* di Negara Berkembang Tahun 2010-2019

Sumber : World Bank, data dioalah

Grafik diatas menunjukkan perkembangan *Non Performing Loan* di Negara Berkembang dalam kurun waktu tahun 2010-2019. Dari grafik diatas dapat dilihat NPL di tujuh negara berkembang mengalami fluktuatif dari tahun ketahunnya. Angka tertinggi dari NPL pada tahun 2010-2019 yaitu negara Afrika Selatan yaitu sebesar 5,79%, kedua dimiliki oleh negara Polandia sebesar 4,98% dan yang ketiga di miliki oleh negara Thailand sebesar 3,89%. Sebaliknya untuk NPL terendah pada negara berkembang dimiliki oleh negara pertama yaitu negara China dengan sebesar 0,95%. Pada posisi kedua dimiliki oleh negara Malaysia sebesar 1,48%, ketiga dimiliki oleh negara Philipina dengan jumlah 1,58% dan yang terakhir dimiliki oleh negara Thailand dengan NPL sebesar 1,77%.

Pemberian kredit yang diberikan oleh pihak bank ke pihak masyarakat dapat mengakibatkan risiko seperti kurang lancarnya pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang dapat disebut dengan istilah kredit macet atau *non performing loan*. Nilai NPL yang besar dapat menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit akan

juga semakin rendah sehingga bank diharapkan harus bisa membuat cadangan penghapusan yang lebih besar. Menurut Amelia (2017) dalam Maflukhah (2021), besarnya nilai NPL bisa mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya seperti bank bisa lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada pihak masyarakat.

Sistem keuangan yang stabil dapat menyebabkan pasar berproses dengan baik, mendorong sektor riil sehingga perekonomian menjadi baik serta dapat mengontrol perputaran uang. Stabilitas sistem keuangan memiliki manfaat bagi masyarakat yang merupakan gambaran baiknya pembangunan di negara tersebut. Stabilitas sistem keuangan dapat memberikan pengaruh pada sektor perbankan, sehingga dapat menjalankan fungsinya seperti menyalurkan dana ke pihak ketiga. Dana yang disalurkan berasal dari masyarakat yang berjenis deposito.

Deposito menjadi pilihan karena dianggap mempunyai suku bunga. Suku bunga deposito adalah sejumlah nilai yang diberikan pihak bank ke nasabah sebab telah menyimpan uangnya yang akan ditarik pada waktu tertentu. Suku bunga deposito mempunyai pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, ketika tingkat suku bunga deposito tinggi akan berdampak pada stabilnya sistem keuangan. Pasalnya, suku bunga deposito yang meningkat masyarakat cenderung akan memilih menabung dengan jenis deposito, sehingga dana yang disalurkan bank semakin banyak serta kredit yang diambil oleh masyarakat akan meningkat yang mana siklus akan memperkuat stabilitas sistem keuangan (Iramayasari dan Adry, 2020). Dengan kata lain, stabilnya sistem keuangan akan kuat terhadap berbagai guncangan atau gangguan ekonomi yang akhirnya dapat melaksanakan fungsinya intermediasi serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai sistem keuangan yang stabil

perlu adanya kebijakan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan inklusif keuangan serta pertumbuhan ekonomi menyeluruh. Inklusif keuangan ialah suatu akses masyarakat pada layanan keuangan yang disebabkan oleh simpanan (Awanti, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan inklusi keuangan ialah solusi tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inklusif keuangan yang tinggi pada masyarakat akan berpengaruh pada cara pengelolaan serta pengambilan keputusan mengenai keuangan dan layanan keuangan dapat menompang perkembangan sektor keuangan nasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara (Iramayasari dan Adry, 2020). Inklusi keuangan terkenal setelah keadaan krisis ekonomi ada ditahun 2008 yang dirasakan masyarakat kalangan menengah kebawah. Inklusi keuangan dibahas pertama kali pada forum internasional *G20 Pittsburgh Summit* 2009 yang memperoleh sembilan prinsip guna inovasi inklusif keuangan. Dunia internasional saat itu mulai memfokuskan kegiatannya ke inklusi keuangan. Program inklusi keuangan dianggap dapat mempunyai prospek positif untuk negara berkembang (Iramayasari dan Adry, 2020).

Program keuangan inklusi perlu diwujudkan guna untuk sistem keuangan yang dapat diakses lebih mudah sehingga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisa mengurangi angka kemiskinan. Program inklusi keuangan dilakukan melalui akses dimana masyarakat belum menikmati layanan keuangan formal yang diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi lembaga keuangan serta ketidaksesuaian produk yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Permasalahan dalam minimnya akses lembaga kuangan formal ialah

adanya hambatan yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa memperoleh layanan keuangan secara formal. Hambatan tersebut bisa seperti posisi pasar, tingkat makro ekonomi, maupun berasal dari model bisnis bank itu sendiri (Awanti, 2017).

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) berekomendasi pentingnya peningkatan di lembaga keuangan mikro pada suatu negara berkembang. *International Monetary Fund (IMF)* mengeluarkan *data base* yang menjelaskan mengenai hubungan inklusif keuangan dalam mendorong peningkatan suatu penelitian mengenai inklusi keuangan. Hal ini, dikarenakan program dari inklusi keuangan perlu dilaksanakan guna menciptakan sistem keuangan yang dapat di akses lebih mudah sehingga bisa memperdalam pasar keuangan di suatu negara dimana dapat berpengaruh terhadap stabilnya suatu sistem keuangan di negara tersebut. Peningkatan terhadap pertumbuhan inklusi adalah tujuan utama yang dilakukan oleh beberapa negara berkembang dengan adanya penurunan angka kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Secara teori, inklusif keuangan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Namun, adanya penerapan program inklusi keuangan akan mengakibatkan dampak yang negatif dan positif terhadap stabilitas sistem keuangan (Hardiyanto dan Arianti, 2019).

Beberapa penelitian menyatakan inklusi keuangan mempunyai pengaruh positif pada berbagai indikator pembangunan di suatu negara berkembang (Sastiono *et al*, 2019). Negara berpendapatan tinggi mempunyai indeks inklusi keuangan serta sistem keuangan lebih tinggi dibanding negara berpendapatan rendah. Inklusi keuangan berpengaruh signifikan positif pada sistem keuangan negara berpendapatan tinggi. Negara berpendapatan menengah kebawah supaya meningkatkan layanan

keuangan guna meningkatkan inklusi keuangan serta meningkatkan perkembangan keuangan untuk meningkatkan sistem keuangan (Deinillah *et al*, 2018).

Inklusi keuangan di sisi lain, bisa mengubah sistem keuangan dalam hal transaksi, layanan serta jalur akses pada masyarakat dalam memperoleh potensi resiko baru atau guncangan yang mengakibatkan ketidakstabilan keuangan misalnya kegagalan kolektif lembaga yang lebih rendah dapat signifikan berpengaruh negatif kestabilan sistem keuangan (Fauziah *et al*, 2020). Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Neaimo (2018) bahwa penelitiannya di MENA inklusi keuangan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, ukuran populasi serta inflasi dianggap bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini disusun bertujuan untuk menganalisis tentang **“Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sitem Keuangan (Studi Kasus Di Negara Berkembang Pada Tahun 2010-2019)”** dengan memperluas metode dan hasil interpretasi serta menyimpulkan penelitian dengan kesimpulan dan menyarankan untuk memberikan solusi dalam memperbaiki permasalahan yang terjadi terhadap inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang pada tahun 2010-2019.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh jumlah cabang bank terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China,

Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019?

3. Bagaimana pengaruh jumlah ATM terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh GDP perkapita terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019?
5. Bagaimana pengaruh *Non FDI capital flow* terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh dari inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019.
2. Menganalisis pengaruh cabang bank terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019.
3. Menganalisis pengaruh jumlah ATM terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019.
4. Menganalisis pengaruh GDP perkapita terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019.

5. Menganalisis pengaruh *Non FDI* terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang (Afrika Selatan, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Polandia, Thailand) pada tahun 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, antara lain; untuk menambah pengetahuan serta pengalaman sehingga mengetahui variabel inklusi keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di negara berkembang.
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan pihak yang melakukan penelitian yang sejalan dengan literature ini.
3. Bagi para penulis yang akan tertarik untuk meneliti kajian ini mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di negara berkembang, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.